

PEMBARUAN TANI

MIMBAR KOMUNIKASI PETANI

Demi Modal Petani Digusur

RUU Penanaman Modal rugikan rakyat. HGU perusahaan besar bisa diperpanjang sampai 95 tahun.
Hak petani atas tanah bisa terancam.

**BANGUN INDONESIA
BUKAN
DARI INVESTASI ASING**



FEDERASI SERIKAT PETANI INDONESIA (FSPI)



Batalkan pengesahan RUU Penanaman Modal

RUU Penanaman Modal adalah bagian dari upaya untuk meliberalisasi pengelolaan ekonomi nasional. Proses pembahasan yang sangat tertutup dan dipaksakan menunjukkan bahwa RUU ini sarat akan kepentingan, baik dari partai politik, pemerintahan yang berkuasa, maupun kepentingan negara-negara kreditor. Rencana pengesahan RUU menunjukkan rendahnya harga diri DPR dan Pemerintah yang mengabdikan pada kuasa modal dan kepentingan asing.

Kami memandang bahwa pengesahan RUU penanaman modal adalah bentuk penjajahan atas kedaulatan ekonomi politik sebuah bangsa. Pengesahan ini juga menunjukkan kebijakan yang paradoks terhadap komitmen kemandirian ekonomi, pengentasan kemiskinan dan mengingkari semangat konstitusi pasal 33 UUD 1945 tentang kewajiban negara melindungi dan mensejahterakan kehidupan rakyat.

Pemerintah tampaknya ingin menjadikan investasi sebagai sumber alternatif pembiayaan pembangunan disamping luar utang luar negeri. Hal ini sama sekali tidak menyelesaikan problem pokok dari bangkrutnya keuangan negara akibat pembayaran utang lebih tinggi dari utang baru yang masuk. Karena tidak nampak keinginan untuk memperjuangkan penghapusan utang sebagai opsi strategis untuk keluar dari kemelut ekonomi saat ini.

Padahal pengalaman sejarah kita menunjukkan, sedikitpun tidak terdapat manfaat ekonomi bagi negara maupun rakyat dengan melayani investasi asing. Berbagai studi memaparkan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk melayani investasi asing sepuluh kali lipat dari nilai investasi yang masuk (Sritua, 1993). Bahkan pada taraf lebih lanjut, investasi asing di Indonesia menyebabkan tingginya tingkat penghisapan ekonomi yang diserap oleh negara-negara industri maju (Mubyarto, 2002).

Kami mencatat bahwa semangat yang terkandung dalam penyusunan RUU Penanaman Modal hanya untuk melayani investasi modal ke Indonesia. Pasal-pasal didalamnya menjadi alat untuk melegislasi eksploitasi dan pengambilalihan sumber-sumber kehidupan rakyat, seperti tanah, air, pertanian, perkebunan, hutan dan sumber daya alam lainnya. Berbagai fasilitas dan kemudahan diberikan untuk melancarkan masuknya investasi. Pemberian HGU hingga 95 tahun, fasilitas pajak, kebebasan repatriasi, penyertaan modal 100 %, perlindungan hukum dari praktek kejahatan korporasi, hingga bebas dari ancaman nasionalisasi.

Dampaknya sudah dapat diperkirakan. Rakyat akan semakin terpinggirkan dan miskin. Perempuan akan semakin tersingkir dan kehilangan akses dan kontrol terhadap pengelolaan sumber daya alam. Akhirnya, pengesahan RUU ini hanya akan mendorong ketimpangan produksi dan distribusi atas sumber-sumber kehidupan rakyat. Inilah kemudian yang menjadi awal petaka munculnya konflik-konflik agraria antara rakyat dengan pemodal yang berakibat pada praktek pelanggaran Hak Asasi Manusia yang sangat serius di Indonesia.

Pertanian berkelanjutan berbasis ekonomi keluarga petani.



Lokasi Kebun:
Desa Cibeureum Dramaga, Bogor
di seberang kebun percobaan IPB



Penanggung Jawab: Henry Saragih
Pemimpin Umum: Zaenal Arifin Fuad
Pemimpin Redaksi: Achmad Ya'kub;
Dewan Redaksi: Ali Fahmi, Agus Rully, Tejo Pramono, M Haris Putra, Indra Lubis, Irma Yani;
Redaktur Pelaksana: Cecep Risnandar
Redaktur: Muhammad Ikhwan, Tita Riana Zen, Wilda Tarigan, Syahroni;
Reporter: Elisha Kartini Samon, Susan Lusiana (Jakarta), Tyas Budi Utami

(Jambi), Harry Mubarak (Jawa Barat), Muhammad Husin (Sumatera Selatan), Marselinus Moe (NTT). **Sekretaris Redaksi:** Tita Riana Zen **Keuangan:** Sriwahyuni **Sirkulasi:** Supriyanto, Gunawan;
Penerbit: Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI)
Alamat Redaksi: Jl. Mampang Prapatan XIV No.5 Jakarta Selatan 12790. Telp: +62 21 7991890 Fax: +62 21 7993426 Email: pembaruantani@fsp.or.id website: www.fspi.or.id

Redaksi menerima tulisan, artikel, opini yang berhubungan dengan perjuangan agraria dan pertanian dalam arti luas yang sesuai dengan visi misi Pembaruan Tani. Bila tulisan dimuat akan ada pemberitahuan dari redaksi.

DAFTAR ISI

RUU Penanaman Modal mencerminkan sikap mental inlander	4-5
Globalisasi, memperparah gizi buruk dan obesitas	6-7
HPP bukan solusi krisis beras	8-9
Kesepakatan WTO selalu rugikan petani	10-11
LAPORAN DARI NYELENI Forum Petani untuk Kedaulatan Pangan	12-13
Perjuangan reforma agraria harus melibatkan petani perempuan	14
Tuntaskan ketimpangan agraria di Jambi	15

Demi Modal Petani Digusur

RUU Penanaman Modal rugikan rakyat. HGU perusahaan besar bisa diperpanjang sampai 95 tahun. Hak petani atas tanah bisa terancam.

Dahulu rakyat Indonesia tergusur dari lahan-lahan pertanian akibat pemerintah kolonial memberlakukan hak atas tanah kepada perusahaan-perusahaan perkebunan Belanda selama 75 tahun. Kini setelah 62 tahun kita merdeka, pemerintah Indonesia lewat Rancangan Undang-undang Penanaman Modal malah memperpanjangnya menjadi 95 tahun.

Wajar saja apabila kecaman berdatangan dari berbagai kalangan. Aksi-aksi demonstrasi pun semakin marak. Berbagai organisasi menyatakan penolakannya. Mereka datang dari kalangan akademisi, ekonom, praktisi hukum, tokoh agama, LSM hingga kaum tani.

Selidik punya selidik, rancangan undang-undang ini dibuat dengan jalan yang tak wajar. Pembahasan RUU yang dilakukan DPR dan Pemerintah sangat tidak transparan. Tidak banyak masyarakat yang mengetahui proses pembahasan RUU tersebut.

Hal ini diakui, anggota Panitia Kerja RUU Penanaman Modal Dewan Perwakilan rakyat (DPR) Hasto Kristianto kepada *Tempo Interaktif* (24/3). Ia menilai rancangan Undang-Undang (RUU) Penanaman Modal masih cacat karena pembahasannya terburu-buru.

Kesan seperti itu tidak datang dari anggota panitia kerja saja. Ketua Fraksi PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo kepada media yang sama mengatakan fraksinya meminta agar pengesahan RUU Penanaman Modal ditunda. Dia meminta DPR memberikan waktu paling tidak satu minggu untuk uji publik sebelum RUU tersebut disahkan. "Agar

masyarakat bisa mengkritisi terlebih dahulu," ujarnya.

Ada banyak hal yang patut dikritisi dari rancangan undang-undang penanaman modal. Diantaranya penyamarataan pemodal asing dan lokal, kepemilikan asing, kewenangan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) hingga perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU).

Secara umum, Revisond Baswir ekonom dari Universitas Gajah Mada menilai RUU ini lebih liberal daripada UU Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (UU PMA). "RUU ini sangat membuka lebar pintu masuk investor asing, sedangkan UU PMA masih membatasi cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup rakyat banyak diserahkan pada negara," katanya kepada *Hukum Online* (28/3).

Pendapat Revisond diamini pula oleh Iman Sugema ekonom dari Institut Pertanian Bogor. Kepada media yang sama, ia mengatakan substansi RUU penanaman modal bertentangan dengan demokrasi ekonomi. "Demokrasi ekonomi sudah tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945. Otomatis RUU ini berseberangan dengan UUD," jelasnya.

Petani terusir

Bagi kalangan petani ada pasal yang sangat mengganggu dalam rancangan peraturan tersebut. Khususnya yang berkenaan dengan perpanjangan HGU bagi perusahaan-perusahaan perkebunan dan kehutanan.

Sekjen FSPI Henry Saragih mengemukakan ketentuan Hak Guna Usaha (HGU) yang bisa diperpanjang hingga 95 tahun sangat menyakiti petani. "Ketentuan ini jauh lebih lama

dari masa HGU sekarang yaitu 35 tahun. Bahkan lebih lama dari masa HGU yang ditetapkan pemerintah Belanda yaitu 75 tahun. Pemerintah tidak pernah memberikan akses terhadap tanah kepada petani, tetapi untuk investor memberikannya begitu saja. Ini cermin kebijakan yang tidak adil," jelas dia.

Lebih jauh, Henry menjelaskan rancangan undang-undang sangat bertolak belakang dengan semangat Undang-undang No.5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria atau lebih dikenal dengan UUPA'60. Mestinya undang-undang apapun yang mengatur masalah agraria harus berpatokan kepada UUPA. "Ini penting agar tidak terjadi tumpang tindih," tegasnya.

Henry juga mengancam apabila rancangan undang-undang itu diberlakukan, pihaknya akan melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Selain itu, FSPI sebagai gerakan petani akan terus melakukan aksi-aksi penolakan lewat demonstrasi-demonstrasi massa.

Langkah tersebut diambil, mengingat RUU penanaman modal akan mempersempit akses petani atas tanah. Tanah-tanah pertanian dan hutan-hutan akan habis dikavling perusahaan-perusahaan besar. Padahal konflik-konflik antara petani dengan perusahaan perkebunan dan kehutanan masih banyak terjadi di desa-desa. Sebagian besar konflik itu karena masalah yang ditimbulkan akibat HGU. Dengan diperpanjangnya HGU, maka konflik-konflik agraria di desa-desa akan semakin marak.

HGU yang panjang memang memberikan kepastian kepada para pemodal. Tapi di lain pihak telah menyingkirkan petani kecil dari lahan-lahan pertaniannya, sekaligus memberikan ketidakpastian hidup kepada petani kecil dalam jangka waktu yang panjang pula.

Cecep Risnandar

RUU Penanaman Modal mencerminkan sikap

■ ELISHA KARTINI SAMON
CECEP RISNANDAR

Keputusan DPR untuk mengesahkan Rancangan Undang-undang Penanaman Modal menuai kecaman keras. Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI) bersama-sama gerakan rakyat dan lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Lawan Nekolim (Gerak Lawan) melakukan serangkaian aksi menentang pengesahan RUU ini.

Kecaman dan penolakan ini disebabkan isi dari rancangan undang-undang yang anti rakyat. Peraturan ini juga dinilai banyak pihak telah menjual kedaulatan bangsa kepada para investor. Berbagai kemudahan diberikan kepada para pemodal untuk menjalankan usahanya di Indonesia. Di sisi lain, akses rakyat terhadap sumber daya produksi semakin terbatas.

Anehnya, Dewan Perwakilan Rakyat sama sekali tidak mengkritisi substansi dari peraturan yang disodorkan pemerintah melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal. Tampaknya, para wakil rakyat akan dengan mudah menyetujui rancangan undang-undang ini.

Deputi Kajian Kebijakan FSPI, Achmad Yakub memandang sikap wakil rakyat di DPR masih dipengaruhi oleh sistem ekonomi neo-liberal. "Ini cermin dari sikap mental inlander. Mereka selalu berpikir bahwa investasi adalah satu-satunya faktor penggerak perekonomian bangsa. Padahal nampak jelas dari pengalaman bangsa ini selama bertahun-tahun bahwa pembangunan nasional yang mengandalkan utang dan investasi asing tidak pernah dan tidak akan memberikan kesejahteraan bagi rakyat," jelasnya.

Ya'kub menyoroti isi rancangan undang-undang yang paling banyak mendapatkan penolakan keras dari petani adalah mengenai Hak Guna Usaha (HGU) atas tanah yang mencapai 95 tahun. "Ini bisa mencapai 3 sampai 4 generasi kehidupan manusia," ujarnya.

Lebih jauh lagi, perpanjangan masa HGU akan mengakibatkan tersingkirkannya kehidupan petani di pedesaan oleh perusahaan-perusahaan besar. Perusahaan-perusahaan besar akan menjadikan peraturan ini sebagai legitimasi hukum untuk mengeksploitasi kekayaan sumber daya bangsa Indonesia demi

mengeruk keuntungan pribadi.

Aksi Massa

Selain berbagai aksi demonstrasi, FSPI bersama dengan elemen-elemen Gerak Lawan lainnya sempat masuk ke dalam ruang sidang paripurna DPR yang sedang melakukan rapat. Saat fraksi-fraksi menyampaikan pandangan sikapnya, para aktivis Gerak Lawan melemparkan selebaran dari atas balkon ruang sidang ke tengah rapat paripurna.

Selebaran bertuliskan "RUU penanaman modal menyengsarakan rakyat", "RUU Penanaman Modal = mental inlander" dan "mengesahkan RUU itu sama dengan antek imperialis" itu berhamburan ke tengah peserta sidang.

Aksi sempat memancing suasana panas. Didik J Rachbini selaku pimpinan sidang mencoba menenangkan forum dan mengusir para aktivis. "Ini penghinaan Dewan, jangan sampai gara-gara selebaran pengesahaan RUU jadi terhambat," serunya. Akhirnya, massa aksi diusir dari ruang sidang oleh Satuan Pengamanan DPR.

Deputi Politik dan Jaringan FSPI, Agus Rully menilai keberpihakan dan perhatian DPR kepada rakyat sangat rendah. Ia juga menuduh wakil rakyat sama sekali tidak mewakili kepentingan rakyatnya tetapi lebih berpihak pada para pemodal asing.

Rully mencontohkan, disaat HGU masih 35 tahun saja banyak terjadi konflik agraria antara para petani kecil dengan perusahaan-perusahaan perkebunan besar yang mengklaim bahwa tanah yang ditempati para petani itu adalah milik mereka. "Bisa kita bayangkan bagaimana nasib sebagian besar rakyat di negeri ini jika hak penguasaan lahan diperpanjang menjadi 95 tahun. Tentu akan menyebabkan semakin melebarnya konflik yang selama ini tidak terselesaikan," jelasnya.

Hal ini dibenarkan Sekjen FSPI Henry Saragih. Ia melihat dampak jangka panjang yang akan ditimbulkan dari pengesahan rancangan undang-undang ini sangat mengkhawatirkan. Rakyat akan kehilangan akses dan kontrol terhadap sumber-sumber daya alam, kehilangan sumber mata pencahariannya, dan semakin besarnya

mental inlander

ketimpangan sosial ekonomi.

Henry menjelaskan, pola pikir sempit yang hanya memandang pembangunan dari sisi pertumbuhan ekonomi makro saja tidak akan dapat berperan banyak dalam mensejahterakan rakyat. "Pemerintah dan DPR harus melihat pembangunan dari sisi yang lebih luas yang mencakup kesejahteraan hidup orang banyak," tukasnya.

Henry juga menengarai kepentingan negara-negara kreditor dalam penyusunan RUU ini sangat kentara. Ini bisa dilihat dari tekanan Bank Dunia, *Asian Development Bank* (ADB) hingga *Japan Bank for International Cooperation* (JICA) yang terus-menerus mendesak pengesahan RUU Penanaman Modal.

"Para petinggi negeri ini lupa atau sengaja melupakan bahwa Indonesia juga punya modal nasional yang amat

besar, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Itu harusnya dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan seluruh rakyat secara merata," jelas Henry.

Lebih lanjut, Henry mengatakan sebagai organisasi petani kecil dan buruh tani, FSPI akan menggugat melalui jalur hukum apabila Pemerintah dan DPR mengesahkan RUU Penanaman Modal. Secara hukum RUU ini telah menyalahi konstitusi bangsa Indonesia pasal 33 yang mengatakan bahwa bumi, air, langit dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya hendaknya dikelola oleh Negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tapi dalam RUU Penanaman Modal ini segala kekayaan alam bangsa Indonesia digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran para pemilik modal.

Alih-alih mengesahkan RUU penanaman modal, Henry menyarankan agar DPR mendesak pemerintah untuk serius menjalankan rencana Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN). Dengan begitu, pembangunan melibatkan partisipasi rakyat bukan hanya segelintir pemodal saja. Pemerintah hendaknya jangan terjebak dalam cara berpikir neoliberal jika sungguh-sungguh ingin mensejahterakan rakyat dan menegakkan kedaulatan di negeri ini.

Wajar saja, bila pakar agraria Gunawan Wiradi heran dengan rencana pengesahan RUU Penanaman Modal yang didalamnya ada klausul perpanjangan masa HGU sampai 95 tahun. Sambil geleng-geleng kepala ia berseloroh, "Kenapa tidak 350 tahun saja sekalian?"

Seperti penjajahan Belanda saja pak!

Pembaruan Tani



Globalisasi memperparah gizi



■ **ELISHA KARTINI SAMON**
*Staf Pusat Kajian Kebijakan
 Federasi Serikat Petani Indonesia*

Sebagian besar masyarakat dunia berlomba-lomba menjadi bagian dari globalisasi tanpa sungguh-sungguh memahami maksudnya. Arus komersialisasi dan perdagangan internasional yang dibawa globalisasi ternyata berpengaruh pula pada kondisi kesehatan dan pola makan suatu bangsa.

Saat ini berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia tengah menghadapi beban ganda. Beban tersebut berupa menjamurnya kasus gizi buruk dan kelaparan, namun di lain pihak disibukkan juga dengan kelainan kesehatan yang berkaitan dengan obesitas.

Laporan FAO mengatakan bahwa lebih dari 800 juta penduduk dunia menderita gizi buruk kronis, di sisi lain terlihat bahwa lebih dari 56 juta kematian di seluruh dunia disebabkan oleh penyakit yang berkaitan dengan kelebihan berat badan dan pola makan yang tidak sehat.

Sebuah penelitian oleh G Reyner yang dirilis awal tahun ini dalam jurnal *Health Promotion International*, menduga transisi dalam pola makan sangat erat kaitannya dengan liberalisasi perdagangan dan globalisasi. Dampak ini sangat kentara di negara-negara berkembang yang mengalami tekanan dari lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia dan IMF untuk menjalankan agenda globalisasi.

Liberalisasi perdagangan mempengaruhi rantai makanan dalam berbagai tingkatan,

mulai dari ekspor-impor bahan pangan sampai kegiatan retail dan promosi. Kondisi tersebut berpengaruh besar terhadap perubahan pola pengadaan pangan tradisional yang dimiliki masing-masing negara. Pada masyarakat tradisional, rantai makanan biasanya pendek dan terfokus pada pangan lokal dan ketersediaannya tergantung musim, namun setelah ada arus perdagangan bebas pola ketersediaan suatu bahan pangan tidak mengenal musim lagi dan cenderung menysihkan pangan lokal.

Keseragaman pola makan yang dipaksakan atas nama pembangunan telah mengurangi diversifikasi sumber pangan. Selain itu, kontrol harga terhadap berbagai kebutuhan pokok semakin mengkerucut pada beberapa pemangku kepentingan saja. Hal ini tentunya berakibat pada meningkatnya harga berbagai kebutuhan.

Kondisi seperti itu menyebabkan akses masyarakat miskin terhadap sumber pangan sangat terbatas. Meningkatnya kasus penderita busung lapar di berbagai wilayah di Indonesia beberapa tahun terakhir ini merupakan salah satu dampak yang sangat kentara.

Sebagai gambaran, sejak tahun 2001-2003 prevalensi gizi buruk di Indonesia selalu mengalami kenaikan dari 26,1%, 27,3% sampai 27,5%. Kasus-kasus gizi buruk ini terutama terjadi di daerah-daerah sentra pertanian seperti di Nusa Tenggara Barat.

Peningkatan kasus gizi buruk di sentra produksi pertanian erat kaitannya dengan globalisasi di sektor perdagangan pangan. Negara-negara maju yang mengalami kelebihan produksi menyebabkan membanjirnya pangan impor di negara-negara berkembang. Akibatnya banyak petani-petani kecil yang terpaksa harus gulung tikar akibat tidak mampu bersaing dengan pangan impor bersubsidi tersebut.

FAO mencatat, semenjak disetujuinya kesepakatan pertanian (AoA) oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), volume ekspor bahan pangan dari negara berkembang menurun drastis dari sekitar 60 persen pada tahun 1960-an menjadi kurang dari 7 persen pada tahun 2000. Hal ini jelas juga berpengaruh pada tingkat pendapatan para

Sebuah penelitian oleh G Reyner yang dirilis awal tahun ini dalam jurnal Health Promotion International, menduga transisi dalam pola makan sangat erat kaitannya dengan liberalisasi perdagangan dan globalisasi. Dampak ini sangat kentara di negara-negara berkembang yang mengalami tekanan dari lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia dan IMF untuk menjalankan agenda globalisasi.

buruk dan obesitas

petani kecil di negara berkembang.

Kelebihan berat badan

Di sisi lain, pesatnya laju perdagangan pangan global mempengaruhi tingkat kompleksitas rantai makanan. Makin banyaknya investasi asing dalam industri makanan di negara-negara berkembang memicu menjamurnya supermarket, waralaba dan makanan instant di perkotaan bahkan sampai juga ke wilayah pedesaan. Perlu dicatat, nilai investasi asing dalam industri makanan mencapai lima kali lipat nilai perdagangan ekspor pangan.

Makanan instant yang tersedia lewat jaringan supermarket dan waralaba telah mempengaruhi pola makan dan konsumsi masyarakat. Pola pangan tradisional masyarakat yang dulunya bersumber pangan pokok lokal kini didominasi dengan makanan cepat saji yang berkadar gula tinggi.

Perubahan pola makan ini berpengaruh buruk bagi kondisi kesehatan masyarakat. Salah satu akibatnya dapat dilihat dari peningkatan penyakit kronis akibat makanan seperti jantung koroner, diabetes, osteoporosis dan obesitas.

Hasil survey pada tahun 2005 yang dilakukan Departemen Kesehatan di ibukota propinsi seluruh Indonesia terlihat jelas adanya kasus obesitas yang cukup tinggi pada kelompok usia 40-49 tahun.

Betapa ironisnya masalah kesehatan yang dihadapi penduduk Indonesia. Di satu sisi masih begitu banyak orang yang menderita kelaparan dan kurang gizi kronis sedang di pihak lain tingkat penderita penyakit akibat kelebihan berat badan dan obesitas juga meningkat.

Perubahan pola konsumsi

Hal penting yang perlu kita soroti dalam masalah ini adalah perubahan pola makan tradisional ini juga memiliki dampak buruk bagi



kedaulatan pangan dalam negeri. Karena, pada umumnya bahan-bahan pangan di impor dari negara lain dan dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan pengolahan makanan besar.

Dari hasil pengamatan Reyner yang dilakukan di 49 negara berkembang pada akhir tahun 90an volume impor lebih dari dua kali volume ekspor bahan pangan. Setelah era pembangunan yang diusung oleh negara-negara maju pada pertengahan tahun 1970an banyak negara yang semakin tergantung pada impor. Contoh jelas dari keadaan ini adalah nilai impor susu, mentega dan telur di Indonesia meningkat cukup besar dari US\$ 326,7 juta pada tahun 2001 menjadi US\$ 566,2 juta di tahun 2006.

Hingga saat ini sudah banyak disadari bahwa globalisasi yang pada intinya merupakan alat legitimasi dari kerakusan perusahaan transnasional telah membawa perubahan pola

makan pada masyarakat dunia.

Kampanye yang dilakukan perusahaan transnasional yang bergerak di bidang makanan cepat saji dan makanan olahan telah berhasil mengubah pola pikir penduduk dunia yang akhirnya tunduk pada iklan.

Gaya hidup tidak sehat yang melekat pada pangan-pangan instan telah membawa serangkaian masalah kesehatan bagi para konsumennya, terutama mereka yang tinggal di kota-kota besar yang telah terhegemonikan iklan.

Sementara itu, kemiskinan akibat sistem ekonomi yang membuat jurang besar antara si kaya dan si miskin, telah melahirkan bencana kelaparan. Bahkan bisa terjadi di wilayah-wilayah yang menjadi lumbung pangan sekalipun. Sebuah ironi yang muncul akibat globalisasi.

HPP bukan solusi

■ ACHMAD YA'KUB



Menyikapi kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah dan politik perberasan nasional akhir-akhir ini, Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI) sebagai ormas tani ingin menyampaikan hal-hal kritis sebagai berikut: *Pertama*, petani menghargai perbaikan pemerintah dengan merevisi Inpres 13/2005 menjadi Inpres 3/2007. Namun menurut kami kenaikan harga yang diatur dalam Inpres 3/2007 belumlah cukup untuk menyejahterakan petani, setelah naiknya ongkos produksi berkali-kali lipat dan meroketnya harga kebutuhan pokok kaum tani pasca kenaikan BBM 126 persen (Oktober 2005). Dari kalkulasi yang dilakukan FSPI di beberapa daerah dengan menggunakan model kesejahteraan dan kemiskinan Biro Pusat Statistik (BPS), harga gabah yang menguntungkan petani adalah pada

angka Rp 3.320 per kilogram. Walaupun demikian, kenaikan HPP saat ini kami sinyalir merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menggairahkan pertanian (terutama di sektor padi).

Petani juga memandang bahwa mekanisme harga maksimal (*ceiling price*) yang diterapkan di dalam Inpres terbaru kurang tepat. Hal ini dapat disimpulkan dari praktek Bulog dan pasar domestik dalam dua tahun terakhir. Pemerintah tidak dapat melindungi pasar domestik dan membeli gabah langsung dari petani karena Inpres hanya memperbolehkan pembelian di bawah atau ekuivalen HPP. Akan lebih rasional dan adil jika pemerintah menetapkan harga dasar (*floor price*) yang menutupi ongkos produksi plus keuntungan petani, dan harga maksimal (*ceiling price*) yang bisa menjadi kontrol pemerintah terhadap pasar. Catatan terakhir, harga bukan satu-satunya faktor yang bisa semerta-merta menyejahterakan petani padi di Indonesia. Masih ada faktor kunci lain, seperti sarana produksi padi (*saprodi*), dan mekanisme pasca produksi yang juga berkaitan dengan harga beras di konsumen nantinya.

Kedua, tentang peran Bulog. Peran Bulog nyata-nyata telah dikebiri pada tahun 1998 dengan Surat Perjanjian (*Letter of Intent/LoI*) yang ditandatangani pemerintah dengan Dana Moneter Internasional (IMF). Mengingat hal ini, maka fakta dwimuka Bulog sebagai pencari untung dan *Public Service Obligation* (PSO) harus segera dievaluasi kritis. Sebaiknya Bulog tetap berkonsentrasi pada fungsi PSO-nya yang melayani petani, serta mengatur logistik pangan rakyat dengan baik. Fungsi strategis ini harus disadari penuh, karena negara besar adalah negara yang bisa mewujudkan kedaulatan pangan bagi rakyatnya. Untuk itu, perlu dipikirkan



krisis beras

sebuah lembaga yang mampu mengontrol secara penuh masalah stok dan logistik pangan rakyat Indonesia.

Karena hal-hal yang prinsipil di atas, Bulog harus bekerja cepat demi rakyat terutama kaum tani. Saat ini, panen raya telah dimulai di beberapa daerah (sebagian besar Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sumatera Utara), dan Bulog harus segera membeli gabah langsung dari petani. Sudah menjadi laporan petani padi FSPI di provinsi-provinsi sentra padi di atas bahwa Bulog tidak pernah turun membeli gabah langsung dari petani. Bahkan di Kabupaten Karawang sentra padi paling dekat dari Jakarta penyerapan Bulog kurang dari 30 persen! Menurut laporan petani FSPI, keuntungan yang diperoleh petani tak seberapa dibanding keuntungan penggilingan dan pedagang. Mereka mendapat margin hampir setengah dari harga beras, dan keuntungan lebih dari 65 persen proses tata niaga beras. Untuk itulah, Bulog harus membeli gabah langsung dari petani, bukan beras dari penggilingan, tengkulak atau pedagang. Dengan cara ini menurut hemat kami, masalah stok tidak menjadi problematika berkepanjangan dan petani akan merasa dilindungi dan dekat dengan Bulog/pemerintah.

Dana yang akan digelontorkan Bulog tahun 2007 sebesar 6.46 trilyun rupiah untuk membeli beras sebanyak 1.615 juta ton sebaiknya dikonversi menjadi pembelian gabah. Hampir 90 persen lebih petani Indonesia menjual gabah, bukan beras. Jadi jika Bulog membeli beras, maka bukan menguntungkan petaninya melainkan pedagang. Hal ini rentan spekulasi, menambah rantai niaga beras, menaikkan harga, serta membuat stok sulit dihitung: persis masalah beras tahun lalu. Dari perhitungan FSPI, dari dana Bulog tahun ini bisa menalangi pengadaan gabah sebesar 3.23 juta ton!

Ketiga, masalah pra dan pasca

produksi: masalah yang paling utama. Masalah terbesar yang dialami petani Indonesia adalah tidak dikuasainya sumber daya produktif yang utama, yakni tanah, air dan sarana produksi. Sekitar 13.7 juta rumah tangga tani adalah petani gurem (hanya memiliki kurang dari 0.5 hektar tanah), irigasi rusak, dan sarana produksi yang mahal karena sistem input pertanian mahal revolusi hijau yang bertahan hingga sekarang. Jika dirunut, yang terus meraup laba adalah korporasi yang bergerak dalam bidang agrokimia, produsen benih hibrida, pupuk dan pestisida. Momentum kenaikan harga gabah saat ini juga jangan digunakan oleh korporasi, tengkulak pencari rente dan pedagang untuk menaikkan harga sarana produksi padi yang hanya akan mengembalikan politik beras menjadi nol besar, dan tak signifikan bagi kesejahteraan petani. Pemerintah juga kerap melupakan aspek pasca produksi, yakni pembenahan rantai niaga beras yang selama ini menguntungkan tengkulak dan pedagang. Satu lagi yang lebih penting, adalah masalah konsumen yang seharusnya tidak hanya berorientasi harga murah. Pemerintah bersama-sama rakyat harus mendidik konsumen untuk membenahi masalah pasca produksi beras.

Untuk itu, petani FSPI selama ini terus berjuang untuk melaksanakan reforma agraria sejati. Reforma agraria sejati inilah yang diharapkan sanggup membenahi sistem kepemilikan sumber daya produktif utama petani yang saat ini masih timpang: tanah, air dan sarana produksi. Untuk itu, kami menekankan bahwa kebijakan harga bukan satu-satunya obat manjur bagi politik perberasan nasional. Pemerintah masih memiliki banyak pekerjaan rumah lain, seperti masalah sumber daya produktif yang harus dimiliki petani, perbaikan tata niaga beras, bahkan masalah konsumen.



Apapun bentuknya, Keseepakatan di WTO

■ SUSAN LUSIANA
ELISHA KARTINI SAMON

Negara-negara berkembang anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) menyatakan komitmennya terhadap perundingan liberalisasi pertanian dalam konferensi tingkat menteri kelompok G33 yang dibuka oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Hotel Grand Melia Jakarta, Rabu (21/3). Dalam konferensi yang digelar dua hari tersebut, G33 mengusung konsep perlindungan produk-produk khusus pertanian, atau lebih dikenal dengan nama SP dan SSM.

Konferensi dihadiri 130 delegasi dari 29 negara anggota. Dalam konferensi ini hadir Direktur Jendral WTO Pascal Lamy, Menteri luar negeri Brazil Celso Amorim sebagai koordinator dari kelompok G-20, Menteri pertanian Jepang

Toshikatsu Matsuka sebagai perwakilan kelompok negara maju. Juga hadir perwakilan dari urusan perdagangan Eropa, Afrika, Karibia dan negara-negara pasifik lainnya.

Dalam pembukaannya, Yudhoyono menegaskan perlunya kerjasama negara berkembang dalam mengubah kebijakan perdagangan produk pertanian. Ia juga menegaskan bahwa pertanian akan menjadi sektor utama dalam strategi pembangunan Indonesia. Karena pertanian merupakan sumber pendapatan penduduk desa, dan menjadi sumber penghidupan sekitar dua puluh lima juta keluarga petani serta menentukan kehidupan dari lima puluh persen penduduk miskin Indonesia.

Sementara itu, Pacal Lamy

mengkhawatirkan fleksibilitas yang diberikan melalui mekanisme perlindungan yang disusulkan kelompok G33 akan berlawanan dengan tujuan negosiasi yakni perluasan akses pasar. Untuk itu, G33 harus berhati-hati dalam menentukan perlindungan produk pertanian dan tidak berlebihan dalam melindungi produk-produknya.

Pada akhir konferensi, G33 menghasilkan tiga pernyataan. *Pertama*, kelompok kecil yang pada dasarnya mampu menolong tercapainya negosiasi multilateral. Oleh karena itu, untuk meyakinkan adanya transparansi, prinsip persamaan dan proses pengakuan hukum dari keputusan hasil negosiasi, maka diperlukan suatu sistem yang terbuka dengan pelibatan penuh seluruh anggota WTO.

Kedua, penghapusan distorsi pasar yang di sebabkan oleh tingginya subsidi dan besarnya hambatan akses pasar dinegara maju, akan memiliki kontribusi dalam mengentaskan kemiskinan. Sebagai contoh dengan pencabutan subsidi ekspor dan penyederhanaan tarif atau pencabutan kebijakan peningkatan tarif impor di negara maju akan menyebabkan pergerakan substansial dari negara berkembang dalam mengakses pasar negara maju.

Ketiga, Pemilihan perlindungan produk khusus harus transparan dalam memutuskan jumlah dan jenis produk yang ditentukan. Alasannya harus dengan mempertimbangkan beragamnya kondisi lokal negara-negara berkembang.

Keputusan tersebut menuai protes dari kelompok masyarakat yang menentang liberalisasi



Aksi protes petani FSPI terhadap WTO, di depan hotel Gran Melia, Jakarta (21/3).

selalu rugikan petani

perdagangan. Achmad Ya'kub, perwakilan dari Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI) membacakan pernyataan dan tuntutanannya dalam pertemuan tersebut.

FSPI sebagai organisasi petani, menentang kesepakatan-kesepakatan di WTO yang selalu memojokkan petani di negara-negara miskin dan berkembang. Kesepakatan di WTO, sangat tidak demokratis dan di setir oleh sekelompok negara-negara maju. Sebesar apapun usaha kelompok G33, tidak akan pernah di terima negara maju. Oleh karena itu, sikap FSPI adalah menuntut WTO untuk keluar dari wilayah pertanian.

Aksi protes

Sementara itu di pelataran Hotel Gran Melia, sekitar 300 massa FSPI melakukan demonstrasi selama dua hari berturut-turut. Mereka memprotes kedatangan Pascal Lamy ke konferensi G33 dengan menggelar konferensi jalanan.

Dalam kesempatan orasinya, Sekjen FSPI Henry Saragih meminta negara-negara G33 tidak menegosiasikan pertanian dalam WTO. Karena, negosiasi di WTO sangat tidak demokratis dan selalu dalam tekanan negara-negara maju. "Apapun bentuknya, kesepakatan di WTO selalu merugikan petani. Usir WTO dari pertanian!", tegasnya.

Henry juga menilai, WTO terlalu ambisius dengan memaksakan impor pangan dan pencabutan subsidi kepada petani. WTO juga mendorong dominasi perusahaan agribisnis raksasa untuk menguasai sektor pertanian.

Sepak terjang WTO dinilai masa konferensi hanya menambah kesulitan negara-negara miskin dan berkembang, terutama kaum tani. Liberalisasi yang didengung-dengungkan WTO, merupakan bentuk pemaksaan kehendak negara-negara



Massa aksi tidur terlentang di sepanjang halaman hotel Gran Melia yang dipakai untuk konferensi tingkat menteri negara G33. Mereka menuntut WTO untuk keluar dari pertanian.

maju untuk menekan negara-negara miskin dan berkembang.

Sehubungan dengan itu, para petani meminta kedatangan Direktur Jenderal WTO Pascal Lamy untuk tidak menekan negara-negara miskin dan berkembang. Sebab, liberalisasi di sektor pertanian sama saja dengan mengancam lapangan kerja sebagian besar rakyat di negara-negara miskin dan berkembang yang mayoritas hidup dari pertanian.

Dalam aksinya, para petani meneriakkan yel-yel usir WTO dan Pascal Lamy. Mereka menganggap WTO sama saja dengan VOC di jaman dulu. Niat lembaga itu melanggengkan penjajahan dan eksploitasi ekonomi atas negara-negara dunia ketiga.



LAPORAN DARI NYELENI

Forum Petani Untuk Kedaulatan Pangan Dunia

(Bagian 2 dari 2 tulisan, habis)

■ MOHAMMAD IKHWAN

Isu lain yang tak kalah mengemuka di tahun-tahun tersebut adalah isu perdagangan internasional—terutama pangan—yang tidak adil, dengan munculnya sistem WTO yang menghalalkan dumping dan pembukaan akses pasar. Dampak sistem WTO ini adalah kehancuran sistem pertanian berbasis keluarga karena tidak mampu bersaing dengan produk pangan berharga supermurah dari negara maju seperti AS dan Uni Eropa, yang terutama dipromosikan oleh perusahaan transnasional raksasa (Cargill, Tyson, Charoen Pokphan, Nestle, dan lainnya).

Subsidi dalam WTO yang berujung pada dumping produk pangan ini juga bersembunyi pada mekanisme kotak-kotak (Green Box, Blue Box dan Amber Box) serta disahkan pada Farm Bill di AS dan Common Agricultural Policy di Uni Eropa. Dengan sistem ini jelas petani kecil di negara miskin dan berkembang yang merupakan ujung tombak produksi pangan terancam kehidupannya, karena produksi, harga dan pasar domestiknya tidak terlindungi dari banjir impor.

Dengan praktek mekanisme pasar bebas, apalagi didahului dengan revolusi hijau yang membuat petani di seluruh dunia tergantung dengan input kimia (pupuk, pestisida), kehancuran sistem pangan jelas jadi kacau. Penyakit-penyakit dengan ongkos sosial tinggi pun muncul: pemiskinan, kelaparan, pengangguran, migrasi, dan sebagainya. Tahun 2002 dicatat dengan ketidakberdayaan FAO dan kegagalan ketahanan pangan dalam mengurangi masalah-masalah mendasar yang telah disebutkan di atas. Tahun-tahun ini juga ditandai dengan banjir impor di negara-negara

miskin dan berkembang, juga dominasi perusahaan transnasional dalam bidang pangan dan agrokimia. Tahun 2006, FAO secara implisit mengakui target mengurangi kelaparan dunia memang tak akan tercapai.

Kedaulatan pangan merupakan hak sebuah negara dan juga rakyatnya—dalam hal ini petani—untuk menentukan sendiri kebijakan pangannya dengan memprioritaskan produksi pangan lokal untuk kebutuhan sendiri, menjamin penguasaan petani atas tanah subur, air, benih, termasuk pembiayaan untuk para buruh tani dan petani kecil, serta melarang adanya praktek perdagangan pangan dengan cara dumping. Kedaulatan Pangan tidak melarang adanya perdagangan pangan, tetapi produksi pangan haruslah diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan lokal sehingga menjamin hak atas pangan bagi setiap orang, diproduksi dengan cara ekologis (agro-ecology) yaitu pertanian berkelanjutan berbasis pada keluarga tani (sustainable agriculture based on family farming). Kedaulatan pangan secara prinsipil juga menjamin harga yang adil dan menguntungkan serta tak lebih rendah dari ongkos produksi terhadap produsen, dan di sisi lain juga menjamin harga yang fair terhadap konsumen. Untuk itulah dalam forum kedaulatan pangan Nyeleni 2007, yang mengikuti adalah enam sektor yang mewakili gerakan kedaulatan pangan dunia: 1) petani 2) nelayan 3) penggembala/kaum pastoralis 4) masyarakat adat 5) buruh; dan buruh migran 6) konsumen dan gerakan perkotaan.

Dalam perjuangannya, inilah

prinsip-prinsip yang diperjuangkan oleh gerakan rakyat untuk menegakkan kedaulatan pangan rakyat (Henry Saragih, 2007): Isu-isu tersebut dirangkum dan dikembangkan lagi di Nyeleni dalam beberapa tema sentral. Tema sentral yang diyakini sangat krusial dalam kedaulatan pangan dalam perkembangannya adalah: 1) kebijakan perdagangan dan pasar lokal; 2) teknologi dan pengetahuan lokal; 3) akses dan kendali terhadap sumber daya produktif (tanah, air, benih, dan sebagainya); 4) pembagian teritori dan penggunaannya antarsektor; 5) konflik dan bencana alam; respon pada level lokal dan internasional; 6) kondisi sosial dan migrasi yang dipaksakan; 7) model produksi. Dalam forum kedaulatan pangan ini, akan ada diskusi antarsektor, antartema sentral, dan tentu juga antar perspektif dari kelompok kepentingan yang terlibat (perempuan, pemuda, dan lingkungan hidup).

Komitmen

Dari diskusi yang cukup membangun ini, akhirnya didapat kesepakatan bersama antar berbagai gerakan rakyat dari berbagai sektor—dan tentu saja dari berbagai penjuru dunia. Komitmen ini dituangkan dalam sebuah deklarasi politik yang menurut saya merefleksikan beberapa hal:

Perjuangan yang sama; bahwa dalam rangka perjuangan kedaulatan pangan ini, berbagai gerakan rakyat dari berbagai sektor dan negara ternyata berbagi nilai-nilai perjuangan yang sama. Ada beberapa yang mencolok yang terlihat jelas, bahwa ada perjuangan massa yang diwujudkan dalam organisasi-

organisasi, dan pengakuan yang sama bahwa pangan adalah hak seluruh umat manusia tanpa membeda-bedakannya; dan oleh sebab itu merupakan perjuangan yang sangat prinsipil. Terlihat juga secara mencolok bahwa gerakan rakyat ternyata menjunjung tinggi kearifan dan pengetahuan lokal untuk perjuangan pangan di wilayah dan sektornya masing-masing. Dan juga bahwa pangan adalah bukan mewakili kepentingan sektor maupun negara tertentu saja, melainkan hak produsen dan konsumen secara khusus dan umat manusia secara universal. Perjuangan prinsipil lainnya menurut saya adalah akses petani dan buruh tani, dan kaum tak bertanah terhadap sumber daya produktif (tanah, air, benih, dan lainnya). Sebuah komitmen internasional juga menjadi cita-cita perjuangan untuk mengikat negara-negara untuk melaksanakan reforma agraria sejati, pengakuan kedaulatan pangan dalam piagam hak asasi PBB, serta persetujuan untuk mengatur supply management (agar tidak terjadi surplus dan overproduksi berlebihan yang bisa mengakibatkan dumping produk pangan). Lebih jauh lagi, tentunya untuk terwujudnya sebuah tata niaga yang berkeadilan, sebuah tata ekonomi baru, yang berbasiskan kedaulatan pangan rakyat.

Musuh yang sama; bahwa lebih dari 10 tahun sudah perjuangan rakyat melawan sistem komodifikasi pangan—mulai dari praproduksi, produksi, distribusi hingga konsumsi. Hal ini tercermin dalam tata ekonomi yang tidak adil, dalam akses terhadap sumber daya produktif yang tidak terdistribusi kepada rakyat atau diprivatisasi. Selanjutnya perjuangan selama ini melawan tata niaga pangan yang tidak adil dengan 80 persen lebih keuntungan dimiliki oleh negara maju—di belakangnya berdiri perusahaan transnasional raksasa. Semuanya ini terwujud oleh tangan-tangan rakus atas nama rejim perdagangan WTO, rejim finansial IMF dan Bank Dunia, ADB, IADB, dan lainnya, juga atas perpanjangan tangan pemerintah negara-negara yang menjadi antek-anteknya. Karena seringnya praktek skandal antara negara-negara kaya dalam mempertahankan kepentingan perusahaan transnasional raksasa, konflik perjuangan sering disebut dengan pemetaan 'Utara-Selatan'. Sebenarnya tidak demikian, karena banyak rakyat di negara-negara utara sendiri sebenarnya menjadi korban

dari kebijakan musuh-musuh yang telah dijelaskan barusan. Benar, bahwa pemerintah negara-negara miskin dan berkembang saat ini mengambil posisi 'berlawanan' dengan dominasi AS dan Uni Eropa. Namun sesungguhnya yang terjadi dalam pangan dan pertanian adalah konflik antara sistem pertanian berkelanjutan dan kedaulatan pangan yang dipromosikan rakyat—baik di negara kaya, maupun di negara miskin dan berkembang. Musuh yang dihadapi sebenarnya adalah model industri, berorientasi ekspor, yang dipromosikan oleh perusahaan transnasional raksasa, AS, Uni Eropa, atau negara industri lain, bahkan juga oleh sejumlah elit dan pemerintah di negara miskin dan berkembang. Oleh sebab itu, La Via Campesina (2003) menyatakan dengan tegas bahwa konflik yang nyata sebenarnya bukan di tingkatan pemerintah—namun di antara model produksi yang ada.

Strategi dan aksi yang sama; Dan bahwa perjuangan selama ini telah membawa hasil yang menggembirakan—dan perjuangan dan harapan harus terus disebarluaskan. Lebih 10 tahun perjuangan melawan WTO, dan sekarang negara-negara mulai mengambil posisi yang lebih kritis dalam negosiasi (seperti kelompok G10 dan G33). Perjuangan rakyat melawan rejim perdagangan ini pun semakin lama semakin masif—bisa dilihat dari perkembangan Seattle, Cancun, hingga Hong Kong. Pertimbangan ilmiah pun sekarang banyak yang mulai mengadopsi tuntutan-tuntutan rakyat, dan tentunya kolapsnya perundingan WTO pada Juli 2006 lalu merupakan sebuah hasil yang berharga. Orang-orang dari seluruh dunia, dari berbagai gerakan telah menjalin pengorganisasian massa, edukasi massa, aksi-aksi hingga kampanye dalam tingkat lokal-regional-internasional. Jaringan-jaringan juga sudah/akan berjalan dan saling berjaln kelindan, dan saling memberi solidaritas dalam kerangka perjuangan bersama. Hari-hari aksi yang sama juga diperingati oleh gerakan rakyat di seluruh dunia, seperti Hari Pangan Sedunia/Hari Kedaulatan Pangan Global (16 Oktober), Hari Perjuangan Petani Internasional (17 April), Hari Buruh (1 Mei), Hari Migran Internasional (18 Desember), dan lainnya.

Dari catatan ini, menurut saya sangatlah penting digarisbawahi bahwa ada komitmen yang sangat

besar yang tercermin dalam proses yang cukup demokratis, hingga terbentuk sebuah konsensus antarsektor, antarwilayah—bahkan hingga ke bentuk-bentuk rigid seperti rencana aksi dan pertukaran informasi.

Hal ini juga penting jika diejawantahkan dalam relasinya dengan gerakan rakyat di Indonesia. Bahwa gerakan mewujudkan kedaulatan pangan telah digagas sejak tahun 2000 dengan pengorganisasian massa, pendidikan dan aksi-aksi. Walaupun Indonesia sepertinya masih terjepit dalam kondisi memperjuangkan basis produksi—karena perjuangannya masih lebih banyak dalam merebut akses dan kendali terhadap sumber-sumber daya produktif (tanah, air, benih, dan lainnya) sejak puluhan tahun lalu, namun itulah sesungguhnya makna perjuangan panjang yang telah lama dibangun di tanah air ini. Menurut saya, kedaulatan pangan tak akan berarti apapun jika masalah pokok ini tak terpecahkan. Reforma agraria, seperti yang diperjuangkan petani sejak dulu, adalah basis dari perjuangan kedaulatan pangan.

Perjuangan kedaulatan pangan juga akan bisa dibangun jika ada platform bersama, seperti komitmen yang diperjuangkan dalam Nyeleni yang baru saja selesai. Komitmen ini tak berhenti di pertemuan-pertemuan saja, namun dioperasionalkan dalam komunikasi dan pendidikan massa di tingkat lokal hingga nasional. Sejauh ini, kedaulatan pangan belum menjadi wadah bersatunya perjuangan antarsektor di Indonesia. Hal ini tentunya dapat dimengerti bahwa perjuangan ini bukan hanya milik sektor tertentu saja, namun butuh bantuan dari sektor-sektor lainnya. Di dalam Nyeleni kemarin, sudah ada komitmen yang terbuka dari organisasi konsumen, organisasi bantuan hukum dan HAM, organisasi buruh, organisasi buruh migran, organisasi perempuan, bahkan organisasi agama, pers dan lainnya—yang mungkin masih dalam taraf awal membangun aliansi yang selama ini sudah dibangun. Kita butuh menaikkan isu ini menjadi lebih luas, karena pangan bukan masalah biasa. Pangan itu berbeda (Peter Rosset, 2006), dan menurut saya adalah salah satu hak paling mendasar yang secara universal harus diperjuangkan umat manusia.

Cargill diprotes petani Brazil

Lebih dari 900 orang petani perempuan dari Via Campesina menduduki pabrik gula Cevasa di wilayah Ribeirão Preto, São Paulo (9/3). Cevasa adalah pabrik gula tebu terbesar di Brazil, yang baru saja dijual kepada Cargill, salah satu perusahaan transnasional pertanian di dunia.

Protes ini sebagai bagian dari “minggu perjuangan” nasional, di bawah semboyan “Perempuan dalam perjuangan mempertahankan kedaulatan pangan”. Di wilayah Ribeirão Preto terkonsentrasi industri gula tebu terbesar di Negara ini, yang juga terkenal dengan pelanggaran terhadap pekerjaannya (termasuk penggunaan tenaga budak). Sejas tahun 2004 sudah terdapat 17 pekerja yang meninggal di wilayah ini akibat kerja yang berlebihan. Industri ini juga bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi.

Perempuan-perempuan ini juga ingin menyikapi ide yang

keliru bahwa produksi ethanol dapat memberikan keuntungan bagi petani kecil dan melindungi lingkungan. Mereka menyampaikan bahwa polusi udara, tanah dan air serta penyakit pernapasan disebabkan oleh pertanian monokultur tebu.

Lebih lanjut, perluasan industri ini juga telah menciptakan peningkatan konsentrasi lahan, kemiskinan, dan masalah social lainnya.

Protes ini juga merupakan aksi melawan proposal yang diajukan pemerintah AS yang menguntungkan perusahaan-perusahaan besar ethanol di Brazil, yang tidak menjadi kepentingan bagi mayoritas penduduk Brazil.

Para petani perempuan anggota Via Campesina membela kebijakan pertanian lainnya yang mengutamakan petani kecil, yang bertanggung jawab terhadap 70% produksi pangan di Negara ini. Mereka juga membela pembaruan pertanian yang lebih luas untuk

mengatasi konsentrasi lahan yang serius.

Untuk menjamin kedaulatan pangan, para pekerja di pedesaan melakukan protes terhadap kunjungan Presiden Bush, dan terhadap usulannya untuk menggunakan sumberdaya Brazil dalam mengatasi masalah kebutuhan energi AS.

Awal konflik

Pada awal tahun 1970an di Brazil, selama masa “krisis” minyak dunia, industri gula tebu mulai memproduksi bahan bakar, yang melegalkan pengelolaan dan perluasannya. Hal yang sama berulang kembali tahun 2004, dengan program baru pro-Alkohol, yang pada prinsipnya berguna bagi kepentingan agribisnis.

Pemerintah Brazil mulai meningkatkan produksi bio-dieselnnya juga, yang menjamin kelangsungan dan perluasan dari perkembangan besar dalam monokultur kedelai. Untuk

mensahkan kebijakan ini dan menyamakan dampak kerusakannya, pemerintah mendorong pembagian produksi bio-diesel ini kepada produsen kecil, dengan tujuan menciptakan “sertifikasi sosial”. Perkebunan monokultur ini telah meluas ke kawasan masyarakat adat dan wilayah lainnya milik penduduk asli.

Pada bulan Februari 2007, pemerintah AS mengumumkan ketertarikannya untuk mengembangkan hubungan kemitraan dengan Brazil dalam produksi biofuels, yang dicirikan dengan prinsip “sumbu simbolik” dalam hubungan antara kedua Negara ini. Hal ini jelas merupakan suatu tahap strategi geopolitik yang dikembangkan Amerika Serikat untuk melemahkan pengaruh Negara-negara seperti Venezuela dan Bolivia di kawasan ini.

Via Campesina | Elisha Kartini

SP JATENG

Perjuangan Reforma Agraria Harus Libatkan Perempuan

Perjuangan pembaruan agraria harus melibatkan perempuan. Hal itu terdapat dalam lokakarya Penguatan Peran dan Keterlibatan Petani Perempuan di Organisasi Tani dalam Memperjuangkan Reforma Agraria. Acara yang digelar FSPI bersama dengan SP-Jateng pada tanggal 8-9 Maret ini bersamaan dengan momen peringatan Hari Perempuan Internasional.

Peran perempuan dalam rumah tangga pertanian dan peran yang mereka lakukan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup petani menjadi

topik utama lokakarya. Para peserta secara terbuka menyampaikan pandangan mereka tentang masalah yang sehari-hari dalam kehidupan sebagai petani dan sekaligus sebagai perempuan. Pertemuan ini juga membahas konsep kedaulatan pangan dan pembaharuan agrarian serta bagaimana petani perempuan dapat terlibat aktif dalam mewujudkan kedua konsep tersebut.

Ada berbagai masalah umum yang dihadapi oleh petani perempuan. Permasalahan tersebut terbagi dalam empat kelompok yaitu masalah politik,

ekonomi, budaya dan keorganisasian. Forum lokakarya menilai akar dari segala permasalahan ini adalah masalah budaya yang akhirnya mempengaruhi pengambilan keputusan pada sektor-sektor lainnya, yang jarang sekali berpihak kepada kepentingan perempuan.

Sebagai kelanjutan dari lokakarya ini, para petani perempuan akan membuat rencana kerja yang nantinya akan diimplementasikan di organisasi tani di masing-masing wilayah.

Wilda Tarigan

Pejuang Reforma Agraria Itu Telah Pergi



Selasa 6 Maret 2007 tepatnya pukul 21.24 WIB, Riduan Ginting Munthe atau yang biasa dipanggil Iwan Munthe, telah pergi dipanggil Sang Khaliq. Ia meninggal dunia setelah berjuang melawan komplikasi penyakit infeksi paru-paru, pembengkakan jantung dan gangguan ginjal.

Almarhum mulai dirawat sejak tanggal 21 Februari 2006 di rumah sakit Permata Bunda, Medan. Setelah enam hari dirawat, kondisinya semakin memburuk dan harus masuk ruang ICU. Pada tanggal 3 Maret, atas rekomendasi tim dokter, mantan Sekjen FSPI periode 1999-2003 ini dipindahkan ke rumah sakit Gleneagles, Medan.

Dokter di rumah sakit Gleneagles juga menyatakan menyerah dan berharap akan adanya keajaiban. Setelah semua usaha dilakukan,

akhirnya Iwan Munthe meninggal dunia.

Almarhum meninggalkan seorang istri bernama Susilawati, aktivis yayasan KKSP (Kelompok Kerja Sosial Perkotaan) Medan dan dua orang anak bernama Laksa (laki-laki), yang diilhami dari kata Laksanakan Reforma Agraria, berumur 8 tahun dan Diah (perempuan), berumur 4 tahun.

Di penghujung hayatnya, pria kelahiran 6 September 1965 ini masih menjabat sebagai anggota Majelis Perwakilan Tertinggi Petani (MPTP) FSPI sejak tahun 2003. Ia juga aktif memimpin tim *Task Force* FSPI untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pasca tsunami.

Selama karir organisasinya, Munthe berperan besar melahirkan Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI). Ia menyambangi berbagai daerah di Jawa, Sumatera dan Nusa Tenggara untuk mengajak berbagai organisasi petani agar bersatu dalam sebuah organisasi nasional. Perjuangannya kala itu begitu berat, mengingat di masa orde baru pemerintah tidak menghendaki adanya organisasi petani yang kuat selain organisasi petani yang disokongnya.

Akhirnya pada tahun 1998, bersama-sama aktivis lainnya ia mendirikan FSPI. Masa itu FSPI didaftarkan di Medan, dan beranggotakan organisasi petani di Jawa dan Sumatera. Satu tahun kemudian, dalam kongres FSPI pertama, Munthe terpilih menjadi Sekretaris Jenderal.

Selain itu, Munthe juga berperan besar mendirikan Perhimpunan Masyarakat Tani Aceh (PERMATA) yang menjadi salah satu anggota FSPI. Kemudian ia juga pernah aktif di Serikat Petani Sumatera Utara (SPSU) pada tahun 2002 sampai 2004.

Di samping organisasi petani, Ia juga punya andil di lembaga swadaya

masyarakat *Flower Aceh* dan Yayasan Biduk Alam, di Langsa.

Walaupun banyak organisasi telah ikut didirikannya, cita-citanya hanya satu, Ia ingin mewujudkan reforma agraria yang sejati. Karena dengan berbasiskan reforma agraria, jutaan petani Indonesia bisa diuntungkan dari masalah kemiskinan. Ketimpangan kepemilikan tanah yang sudah begitu besar adalah permasalahan mendasar yang harus dituntaskan untuk membangun bangsa ini.

Munthe yakin, dengan menguatkan organisasi rakyat reforma agraria bisa diwujudkan. Oleh karena itu, semasa hidupnya dihabiskan untuk membangun dan membangkitkan organisasi organisasi rakyat.

Selama aktif di FSPI, Ia juga mendirikan dan mengembangkan Tabloid Pembaruan Tani yang sedang anda baca ini. Di masa awal, Pembaruan Tani masih terbit dua bulan sekali. Di masa-masa itulah ia mengerjakan penerbitan tabloid di sela-sela kesibukannya sebagai sekjen FSPI. Berkat semangatnya, tabloid ini meningkatkan frekuensi terbitnya menjadi sebulan sekali dan sudah masuk tahun ke lima.

Untuk Pembaruan Tani, Munthe mempunyai visi agar tabloid ini bisa menjadi mimbar komunikasi petani. Dengan adanya sarana media massa petani, diharapkan bisa mendukung dan menjadi alat propaganda bagi perjuangan pembaruan agraria.

Ia seorang pejuang rakyat tani sejati. Bagi kita yang ditinggalkan, hendaknya mendoakan semoga amal kebajikannya diterima Tuhan. Tentu kita terus akan memperjuangkan apa yang dicita-citakan, dengan mencontoh semangat yang telah Almarhum gelorakan.

Cecep Risnandar | SPSU



PERTAJAM

Koperasi produksi karet untuk kedaulatan ekonomi petani

Petani yang tergabung dalam Persatuan Petani Jambi (Pertajam) di Kecamatan Mestong, Muaro Jambi, mempunyai koperasi karet berbasis ekonomi rakyat sebagai jawaban dari ketidakadilan model pengusahaan perkebunan karet perusahaan-perusahaan besar. "Pengusahaan perkebunan oleh perusahaan besar hanya menguntungkan segelintir orang. Maka kami membuat model usaha produksi sendiri," ujar Rahmat, Ketua Pertajam Kecamatan Mestong.

Bukan cerita baru kalau bahwa perkebunan yang berorientasi ekspor dan monokultur telah menyebabkan banyak masalah di daerah-daerah penghasil karet di Indonesia. Mulai dari pencaplokan tanah, pencarian rente, hingga tata niaga yang tak berpihak pada petani kecil.

Hal ini diakui juga oleh Sarwadi, salah seorang pimpinan Pertajam. Secara umum, menurutnya usaha pertanian dan perkebunan terutama karet seringkali didominasi orang tertentu. Terutama di Jambi, usaha perkebunan karet dikuasai hampir seluruhnya oleh etnis Cina.

Mulai dari sinilah masalah kerap kali muncul. Dari mulai monopoli pembelian oleh tengkulak, hingga timbangan yang diakali sudah jadi

makanan sehari-hari petani karet di Jambi. Untuk itulah, akhirnya petani berembuk untuk menemukan 'pengikat' yang bisa memperbaiki kondisi sosial ekonomi mereka.

Dari beberapa pertemuan awal, disepakati bahwa keadilan tata niaga karet merupakan hal yang tidak bisa ditawar lagi. Kondisi harga, pasar domestik dan struktur rantai niaga yang tidak adil menjelaskan pilihan akhir petani Mestong. Keinginan mandiri, lebih sejahtera, dan berdaulat dalam menentukan harga menjadi sasaran utama. Koperasi adalah yang kemudian ditetapkan sebagai bentuk organisasi yang secara prinsipil mampu menjawab tantangan dan ancaman yang selama ini dihadapi. "Juga karena koperasi merupakan warisan ekonomi kerakyatan yang diwariskan founding fathers bangsa kita, dan diharapkan bisa mewujudkan keadilan bagi setiap anggotanya," tukas Sarwadi.

Pada 19 April lalu, diadakanlah sebuah diskusi mengenai pembangunan koperasi yang diprakarsai oleh Pertajam Kecamatan Mestong dan Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI). Hadir kala itu Deputy Pengembangan Ekonomi Petani FSPI, Syahroni. Prinsip gotong-royong dan keadilan menjadi salah satu masalah

utama yang diperdebatkan pada saat itu. "Masalah lain yang muncul adalah, bagaimana teknis mengefektifkan koperasi di tingkat basis," ujar Syahroni. Hal ini berkaitan dengan jumlah koperasi di Kecamatan Mestong yang ternyata cukup banyak—sekitar 200-an, namun hanya belasan yang aktif.

Sedangkan potensi ekonomi komoditas karet di daerah ini tidak perlu ditanyakan lagi. Dari analisis usaha tani awal, ada selisih keuntungan dari model perusahaan yang hanya sekitar Rp 7000-an per kilogram karet dengan Rp 9300 dengan model koperasi yang menyatukan sekitar 40-an keluarga tani. "Tak pelak lagi, keuntungan ini tentunya bisa menjadi cikal bakal logistik perjuangan, dan memperkuat kemandirian petani," tukas Syahroni di akhir diskusi. Pertajam berkomitmen akan melanjutkan diskusi dan merealisasikan pendirian koperasi sebagai bentuk usaha ekonomi kerakyatan yang berkeadilan. Tercatat sudah ada beberapa daerah yang mulai hangat membentuk koperasi, seperti di Mestong (karet), Kasang Pudak (palawija dan hortikultura), dan Geragai (sawit).

Muhammad Ilhwan

Tuntaskan Ketimpangan Agraria di Jambi

Persatuan Petani Jambi (Pertajam) harus berjuang untuk menuntaskan ketimpangan agraria. Hal itu dikatakan Sekjen FSPI Henry Saragih dalam acara pelantikan pengurus organisasi tani lokal Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi, pada tanggal 24 Maret lalu. Pertajam Kecamatan Mestong dideklarasikan pada tanggal 15 Februari lalu.

"Dengan terbentuknya Pengurus Pertajam Kecamatan

Mekstong, tentunya perjuangan Pertajam dan kaum tani pada umumnya akan lebih kuat lagi," tutur Henry Saragih.

Lebih lanjut Henry mengatakan, "Indonesia adalah negara yang kaya sumber agraria, tapi sampai sekarang kondisi petaninya masih terpinggirkan dan miskin. Hal ini melatar belakangi berdirinya FSPI pada tahun 1998 di Lobu Rapa, Sumatera Utara. Sebagai organisasi tani anggota FSPI, tentunya Pertajam harus bersama-sama

petani menuntaskan persoalan yang dihadapi petani, seperti ketimpangan struktur agraria."

Sarwadi berharap pengurus terpilih bisa menjaga amanah organisasi dan perjuangan petani pada umumnya. "Saling kordinasi dan berbagi peran dalam menjalankan organisasi serta pertemuan-pertemuan rutin adalah kunci memperkuat organisasi," tandasnya.

Dalam acara ini, Rokhmad

dilantik sebagai ketua umum Pertajam Kecamatan Mestong. sebagian besar warga Kecamatan Mestong adalah petani dengan produk-produk andalan tanaman karet dan hortikultura. Dalam pidatonya, Rokhmad bertekad untuk merapatkan barisan dengan membangun organisasi tani demi kehidupan petani yang lebih baik dan meningkatkan posisi tawar petani dalam struktur sosial dan politik masyarakat. CR